

# Kebijakan Ekonomi Arab Saudi dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19

**Kaisar Lahiya Sikki**

King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia

Email: [kaisarlahiya@gmail.com](mailto:kaisarlahiya@gmail.com)

<b>Keywords:</b>	<b>Abstract:</b>
<i>Saudi Arabian, Fiscal Policy, Moneter Policy, Covid-19</i>	<i>This study aims to analyze Saudi Arabia's economic policies in anticipation of the Covid-19 effect's on its national economy. These policies cover international economic, fiscal, and monetary policy. This study used the qualitative method through scientific observation by collecting non-numerical data, while focusing on making meaning. The results of this research show that there is an attempt by the Saudi Arabian Kingdom in its international economic policy to channel donations to WHO. On the other hand, monetary policy is needed to stabilize the economy by supporting solid fiscal policy when the global word is flooded with liquidity such as nominal interest rates which is closed to or below zero. So, the impact on lower interest rates can trier cash outflows from the stock market. In this case, the Kindom of Saudi Arabia is very fast and responsive in carrying out a combination of these policies.</i>

<b>Kata kunci:</b>	<b>Abstrak:</b>
Arab Saudi; kebijakan fiskal; kebijakan moneter; covid-19	Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan ekonomi Arab Saudi dalam mengantisipasi efek Covid-19 terhadap perekonomian nasional-nya. Kebijakan-kebijakan ini mencakup kebijakan ekonomi internasional, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi ilmiah dengan mengumpulkan data non-numerik, sambil berfokus pada pembuatan makna.. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya kerajaan Arab Saudi dalam kebijakan ekonomi internasionalnya untuk menyalurkan donasi ke WHO. Di lain pihak, kebijakan moneter diperlukan untuk menstabilkan perekonomian dengan mendukung kebijakan fiskal yang solid ketika dunia global ddibanjiri likuiditas seperti tingkat bunga nominal yang mendekati atau di bawah nol, sehingga berdampak pada penurunan suku bunga dapat memicu keluarnya uang tunai dari pasar saham. Dalam hal ini Kerajaan Arab Saudi sangat cepat dan tanggap dalam menjalankan kombinasi kebijakan-kebijakan tersebut.

Received: April 2, 2020. Revised: April 20, 2020. Accepted: April 26, 2020

## 1. Pendahuluan

Data menunjukkan bahwa perang total melawan Covid-19 tampaknya mulai dimenangkan oleh Tiongkok. Hong Kong, Taiwan, Singapura dan Jepang juga telah menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi wabah, hal ini tidak diragukan lagi karena pengalaman mereka dalam menangani epidemi SARS di tahun 2003. Justru di suatu sisi epidemi di benua Eropa dan Amerika Serikat malah semakin berkecamuk.

Negara yang paling terpuuk sejauh ini adalah Italia berdasarkan data dari situs wordometer sebesar 86.498 kasus dengan tingkat kematian sebesar 9.194 jiwa, yang mana Italia memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan China. Sistem kesehatannya kewalahan, mematikan ekonomi ritel dan

mengkarantina seluruh negara. Semua toko kecuali apotek dan toko kelontong tutup. Orang-orang telah diperintahkan untuk tinggal di rumah dan dapat memasuki tempat-tempat umum hanya untuk berbelanja atau bepergian ke tempat kerja yang diperlukan. Banyak kewajiban utang publik dan swasta seperti sewa rumah dan pembayaran bunga utang telah ditangguhkan. Italia juga berusaha memperlambat jam ekonomi sampai wabah virus corona benar-benar hilang.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi yang parah pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan memutuskan untuk meningkatkan pinjaman dan membelanjakan lebih banyak pengeluaran di sektor infrastruktur. Secara teoritis peningkatan pengeluaran pemerintah ini memberikan suntikan dana ke dalam perekonomian dan membantu menciptakan lapangan kerja. Serta akan menyebabkan munculnya efek multiplier di mana injeksi awal ke dalam ekonomi menghasilkan dampak lebih lanjut dari pengeluaran yang lebih tinggi tersebut. Peningkatan permintaan agregat itu sendiri dapat membantu perekonomian keluar dari resesi. Jika pemerintah merasa bahwa inflasi adalah suatu masalah maka mereka dapat mengejar kebijakan fiskal deflasioner (pajak yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih rendah) dalam rangka mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter disatu sisi lebih efektif diterapkan dengan menetapkan tingkat suku bunga setiap bulan. Keputusan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah mungkin membutuhkan waktu untuk memutuskan ke mana harus mengeluarkan uang. Namun, resesi keuangan global tahun 2007 menunjukkan bahwa kebijakan moneter juga dapat memiliki banyak keterbatasan diantaranya:

- a. Target inflasi terlalu sempit. Selama periode 2000-2007, inflasi rendah tetapi bank-bank sentral mengabaikan ledakan yang tidak berkelanjutan di pasar perumahan dan pinjaman bank.
- b. Perangkap likuiditas. Dalam resesi, pemotongan suku bunga mungkin terbukti tidak cukup untuk meningkatkan permintaan karena bank tidak ingin meminjamkan dan konsumen terlalu khawatir untuk berbelanja. Pada bulan Maret 2009 suku bunga dipotong dari 5% menjadi 0,5% tetapi ini ternyata tidak menyelesaikan resesi yang terjadi di Inggris.
- c. Bahkan pelanggaran kuantitatif berupa pencetakan uang mungkin tidak efektif lagi jika bank hanya ingin menyimpan uang ekstra di neraca mereka.
- d. Pengeluaran pemerintah secara langsung menciptakan permintaan dalam perekonomian dan dapat menjadi langkah awal untuk mengeluarkan perekonomian dari resesi. Jadi dalam resesi yang parah yang hanya mengandalkan kebijakan moneter, mungkin tidak cukup untuk mengembalikan keseimbangan dalam perekonomian.
- e. Dalam perangkap likuiditas, kebijakan fiskal ekspansif tidak akan menyebabkan crowding out karena pemerintah menggunakan penghematan surplus untuk mendorong terjadinya permintaan dalam perekonomian.

Dalam upaya mencegah terjadinya resesi yang parah maka sangat dibutuhkan kombinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ekspansif. Dan langkah-langkah ini sedang dilakukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi bersama dengan otoritas moneternya (SAMA) dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Paper ini terdiri dari empat bab; bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan tentang dampak ekonomi secara umum terhadap negara yang paling terimbas oleh wabah Covid-19 dan bagaimana respon kebijakan ekonomi terhadap fenomena wabah tersebut. Adapun bab kedua menjelaskan secara singkat tentang metode kualitatif yang digunakan dalam penulisan paper ini. Selanjutnya pada bab ketiga memberikan analisis terhadap hasil serta pembahasan penelitian mengenai kebijakan ekonomi internasional, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang diimplementasikan di Kerajaan Arab Saudi sebagai sebuah negara Islam. Pada bab akhir menyajikan kesimpulan yang berkaitan dengan hasil dan pembahasan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi ilmiah dengan mengumpulkan data non-numerik, dan berfokus pada pembuatan makna. Hal ini dilakukan melalui studi kasus yang terjadi, observasi langsung pada kebijakan ekonomi yang berupa kebijakan ekonomi internasional, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Kerajaan Arab Saudi dalam menghadapi wabah Covid-19. Jenis penelitian kualitatif menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan mengapa atau bagaimana suatu fenomena tertentu dapat terjadi serta seberapa sering hal itu terjadi. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan di banyak disiplin ilmu, dengan berfokus terutama pada elemen manusia dari rumpun ilmu sosial dan ilmu alam. (Babbie, 2014)

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini ada beberapa kerangka teori yang menjelaskan secara detail tentang efektifitas kebijakan yang seharusnya dilaksanakan pemerintah dan bank sentral dalam upaya mengantisipasi resesi ekonomi.

Permintaan agregat atau Aggregate Demand (AD) dapat dihasilkan melalui pendapatan yang ditransfer ke segmen pengeluaran sebagai konsekuensi dari aliran sirkuler pendapatan. Sedangkan pendapatan ini biasanya dihabiskan untuk keperluan konsumsi barang dan jasa (Consumption/C) ditambahkan pengeluaran untuk barang modal oleh perusahaan (Investment/I). Sementara pengeluaran (G) dihasilkan oleh pemerintah ketika mengalokasikan sumber daya untuk barang publik dan transfer pendapatan, termasuk diantaranya dana pensiun. Demikian juga dengan pengeluaran luar negeri netto (X) yang merupakan pengeluaran luar negeri untuk ekspor barang dan jasa suatu perekonomian dimana lebih sedikit dari yang dihabiskan dalam suatu perekonomian daripada keperluan impor (M) barang dan jasa.

Model permintaan agregat dan penawaran agregat (AD-AS) menyediakan kerangka kerja yang menunjukkan bagaimana tingkat AD dan AS merespon perubahan tingkat harga, serta bagaimana perubahan permintaan agregat dan penawaran agregat mempengaruhi output nasional ekonomi dan tingkat harga. Terlepas dari komponen impor komponen AD berbanding terbalik dengan harga. Setiap komponen merespon secara berbeda terhadap perubahan harga. Dengan kata lain mereka memiliki elastisitas yang berbeda sehubungan dengan tingkat harga. Sebagai contoh, kita dapat mengasumsikan bahwa permintaan luar negeri elastis terhadap harga karena konsumen luar negeri dapat memilih dari banyak pemasok global. Hal ini yang membuat mereka sangat sensitif terhadap perubahan harga produk-produk impor. Kurva AD menunjukkan hubungan antara AD dan tingkat harga. Dimana diasumsikan bahwa kurva AD akan miring ke bawah dari kiri ke kanan. Ini karena semua komponen AD, kecuali impor, berbanding terbalik dengan tingkat harga. Kurva AD miring ke bawah karena komponen AD berbanding terbalik dengan tingkat harga. Perubahan harga memiliki sejumlah pengaruh penting pada perilaku agregat rumah tangga dan perusahaan (Mankiw, 2006).

Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah berupa perubahan pada tingkat pengeluaran pemerintah atau tingkat pajak. Untuk meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan memotong pajak dan meningkatkan pengeluaran sebagai konsekuensinya berdampak pada tingginya defisit anggaran. Sebaliknya untuk mengurangi permintaan dan mengurangi inflasi, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak dan memangkas pengeluaran sehingga menyebabkan defisit anggaran yang lebih kecil (Hommes, et.al., 2020).

Kebijakan moneter biasanya dilakukan oleh Bank Sentral atau otoritas moneter yang terdiri dari penetapan suku bunga dasar dan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Misalnya Bank Sentral dapat menetapkan target inflasi sebesar 2%. Akan tetapi jika diprediksi bahwa inflasi akan melampaui target inflasi karena pertumbuhan ekonomi terlalu cepat maka mereka akan menaikkan tingkat suku bunga.

Suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya pinjaman dan mengurangi belanja konsumen dan investasi yang mengarah ke permintaan agregat yang lebih rendah dan inflasi yang lebih rendah. Sebaliknya jika ekonomi mengalami resesi maka Bank Sentral akan memangkas suku bunga.

Setelah melakukan studi literatur dan observasi terhadap kebijakan ekonomi Kerajaan Arab Saudi tentang penanganan dampak efek wabah Covid-19 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah suatu penelitian yang memiliki unsur kebaruan dan orisinalitas. Terlebih lagi isu wabah virus corona adalah sesuatu yang baru dalam kajian penelitian ekonomi. Penelitian ini juga masih tergolong langka, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dan tambahan wawasan untuk penelitian selanjutnya.

#### **a. Efektifitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal**

Dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan moneter menjadi lebih populer karena kebijakan moneter ditetapkan oleh Bank Sentral, yang mana pengaruh politik tidak terlalu signifikan dalam pelaksanaannya. Misalnya saja politisi tidak mudah memangkas suku bunga disebabkan keinginan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi berkembang sedang pesat sebelum memasuki pemilihan umum.

Selain itu kebijakan fiskal dapat memiliki lebih banyak efek samping pada sisi penawaran dalam skala perekonomian yang lebih luas. Misalnya, untuk mengurangi tingkat inflasi, penerapan piranti kebijakan yaitu pajak yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih rendah tidak akan menjadi populer, dan pemerintah boleh jadi tidak tertarik menerapkan kebijakan ini. Terutama pengeluaran pemerintah yang lebih rendah justru dapat menyebabkan berkurangnya fasilitas layanan publik, dan pajak penghasilan yang lebih tinggi dapat menciptakan disinsentif untuk bekerja (Kuttner, 2002).

Monetaris berpendapat bahwa kebijakan fiskal ekspansif dengan asumsi defisit anggaran yang lebih besar kemungkinan akan menyebabkan crowding out yaitu pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi akan mengurangi pengeluaran sektor swasta. Dan pinjaman pemerintah yang lebih tinggi mendorong kenaikan tingkat suku bunga. Sebagai contoh konkret, kebijakan fiskal ekspansif pada pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi malahan tidak membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh pengambil kebijakan, justru mendorong pengeluaran yang tidak efektif sehingga pada gilirannya sulit meminimalisir efek crowding out tatkala resesi ekonomi sudah berakhir (Clarida, 2002).

#### **b. Kebijakan Ekonomi Internasional Kerajaan Arab Saudi**

Kerajaan Arab Saudi memiliki langkah yang sangat cepat dan tepat dalam mengantisipasi pandemic virus corona baik pada konteks dalam negeri maupun dalam skala global. Diantaranya di tingkat global Raja Salman bin Abdul Aziz menggelintarkan sumbangan sebesar US\$ 10 juta sebagai kontribusi nyata untuk mendukung upaya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam memerangi pandemi virus corona berupa pelaksanaan langkah-langkah mendesak dalam meminimalisir penyebaran penyakit dan sekaligus untuk mendukung negara-negara dengan infrastruktur kesehatan yang rentan. Sementara itu Direktur Jenderal WHO sangat menghargai gerakan kemanusiaan yang sangat dermawan ini yang mana akan berkontribusi secara signifikan pada upaya untuk melindungi kesehatan global<sup>1</sup>. Dan hal ini merupakan pengamalan yang baik dari ayat Al-Qur'an dimana Allah Subhanahu Wata'ala berfirman:

وَأَنْتُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

... berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. (QS. An Nur: 33)

Ayat ini menegaskan bahwa harta itu adalah milik Allah Subhanahu Wata'ala dan kita wajib menginfakkannya terutama disaat diperlukan dan dalam mewujudkan mashlahat individu dan masyarakat.

Di dalam negeri sendiri pihak berwenang Arab Saudi mengatakan bahwa kasus virus korona terus menerus diidentifikasi dan mengalami peningkatan hingga 1104 kasus (data wordometer, sehingga berdampak pada penangguhkan perjalanan melalui udara dan laut menuju Arab Saudi serta larangan keluar malam selama 21 hari untuk mencegah penyebaran penyakit. Sementara itu juga diumumkan bahwa orang-orang yang memberikan informasi yang tidak benar terkait kesehatan di pintu masuk akan membayar denda hingga SAR133.000 (KSA's Ministry of Interior, 2020).

Kebijakan-kebijakan lainnya adalah Kerajaan Arab Saudi menghentikan masuknya para wisatawan dan penutupan total pintu umrah dari dalam dan luar negeri. Kementerian Pendidikan Arab Saudi juga telah meliburkan sekolah dan universitas sebagai bagian dari tindakan pencegahan yang direkomendasikan oleh kementerian kesehatan. Keputusan tersebut mencakup semua lembaga pendidikan publik, swasta, lembaga pelatihan teknis, kejuruan dan kegiatan pengajian dan halaqah tahfiz Al Quran di masjid, termasuk masjid-masjid untuk sementara tidak lagi dibuka untuk sholat lima waktu dan sholat Jumat. Tentu saja kebijakan-kebijakan ini akan memberikan implikasi negatif pada perekonomian dalam skala makro maupun dalam skala mikro, namun sepertinya Arab Saudi lebih mengedepankan mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Di kancah global, Arab Saudi telah menginisiasi KTT luar biasa G-20 secara virtual di tengah pandemi virus corona dimana pada pertemuan ini fokus pada mengkoordinasikan respon-respon dari negara-negara anggota dan dengan mengedepankan serangkaian kebijakan terkoordinasi dari para pemimpin negara G20 terhadap wabah COVID-19 dengan tujuan melindungi manusia dan menjaga kestabilan ekonomi global.

Dalam perspektif ekonomi, resesi yang parah kemungkinan akan terjadi, bahkan dapat dilihat pada dampak di Indonesia melalui pergerakan kurs rupiah yang sudah sangat mengkhawatirkan dan beberapa ekonom telah menyerukan pemerintah untuk memperkenalkan langkah-langkah dalam rangka mendorong permintaan agregat. Merujuk pada teori Keynes, penurunan dalam permintaan agregat dapat menyebabkan perekonomian hancur. Tetapi di satu sisi rekomendasi teori ini tidak memadai, mengingat bahwa ekonomi global mengalami guncangan pada sisi supply yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada faktanya orang-orang tidak berada di tempat kerja karena mereka sakit atau dikarantina. Dalam situasi seperti itu, tingginya permintaan hanya akan mendorong inflasi, yang berpotensi mengarah pada stagflasi dimana pertumbuhan GDP yang lemah atau turun bersamaan dengan kenaikan harga, seperti yang terjadi selama krisis minyak tahun 1970-an (Barro, 1987).

Parahnya, langkah-langkah yang menargetkan perbaikan pada sisi permintaan bahkan bisa menjadi kontraproduktif, karena implikasi teori ini akan mendorong kontak sosial, sehingga merusak upaya untuk membatasi penularan virus. Suatu hal yang kontradiktif ketika pemerintah Italia memberikan rakyatnya uang untuk berbelanja namun disaat yang sama pemerintah menutup toko dan memaksa semua orang untuk tinggal di rumah.

### **c. Kebijakan Fiskal Kerajaan Arab Saudi**

Ahli epidemiologi memandang perlunya penurunan drastis dalam aktifitas ekonomi, malah bertentangan dengan tinjauan ekonomi karena dapat mengakibatkan jatuhnya pasar saham. Berkaitan erat dengan kebijakan bank sentral tentang penurunan tingkat suku bunga hingga mendekati nol dan penundaan pembayaran utang akan menyebabkan bubble ekonomi yang tidak berkesudahan karena mereka sebenarnya menggunakan kebijakan pada saat yang tidak tepat. Sebagai konsekwensinya bank sentral akan memikul tanggung jawab atas bubble ekonomi yang akan meledak kecuali jika didukung oleh kebijakan fiskal yang solid dari pemerintah (Friedman, 1960).

Dalam pelaksanaan teori ini sebagai respon pemerintah Arab Saudi terhadap pandemi virus corona, pihak Kerajaan benar-benar mengambil langkah-langkah fiskal serius untuk menyelamatkan perusahaan dan bank dari kebangkrutan, sehingga mereka dapat pulih dengan cepat insyallah begitu pandemi berakhir. Pembuat kebijakan secara teori harus mempertimbangkan berbagai bentuk keringanan pajak dan jaminan publik untuk membantu perusahaan sektor swasta meminjam dan menangguk kewajiban terhadap pemerintah jika perlu. Dan pendekatan ini sedang diterapkan di Arab Saudi yang diantaranya berupa;

- 1) Pembebasan biaya bagi ekspatriat yang akan final exit yang mana iqama (izin tinggal) telah kadaluwarsa dari sekarang hingga 30 Juni 2020 serta diberikan keringanan memperpanjang iqama mereka dalam jangka waktu 3 bulan tanpa biaya.
- 2) Pengusaha juga dapat mengembalikan biaya visa kerja yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri yang mana belum digunakan oleh pengusaha tersebut setelah keluarnya larangan perjalanan entri dan exit ke Arab Saudi. Termasuk visa yang telah distempel di paspor mereka dapat memperpanjang kembali periode visa tersebut selama 3 bulan tanpa dikenakan biaya apapun.
- 3) Pemerintah mengizinkan pengusaha untuk memperpanjang visa exit dan re-entry yang tidak digunakan disebabkan larangan perjalanan dari Kerajaan Arab Saudi untuk jangka waktu 3 bulan tanpa biaya (KSA's Ministry of Interior, 2020).
- 4) Pengumuman ini juga memungkinkan pemilik bisnis dalam jangka waktu 3 bulan untuk menunda pembayaran PPN, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan dan pengajuan pernyataan Zakat dan pembayaran kewajiban lainnya.
- 5) Pembayaran beberapa kewajiban sektor swasta berupa biaya layanan pemerintah, biaya kementerian tata kota (baladiyah) ditunda dalam jangka waktu 3 bulan, serta menetapkan kriteria yang diperlukan untuk memperpanjang periode penundaan untuk kegiatan yang paling terpengaruh oleh kebijakan antisipasi corona namun diperlukan untuk hajat hidup orang banyak. (KSA's Ministry of Municipal and Rural Affairs, 2020)
- 6) Menteri Keuangan berhak untuk memberikan pinjaman (tentu saja melalui persetujuan raja) dalam bentuk pembiayaan terkait lainnya serta pembebasan dari pembayaran biaya dan pengembalian pinjaman yang diberikan sampai akhir tahun 2020 dalam inisiatif program keberlanjutan perusahaan.
- 7) Menunda pengumpulan bea masuk impor dalam jangka waktu 30 hari terhadap pengajuan jaminan bank untuk tiga bulan ke depan dan menetapkan kriteria yang diperlukan untuk memperpanjang periode penundaan untuk kegiatan yang paling terimbas oleh kebijakan antisipasi corona namun diperlukan untuk hajat hidup orang banyak (KSA's Ministry of Finance, 2020).

Meskipun para ekonom tetap waspada terhadap kemungkinan terburuk kerugian yang akan terjadi akibat meningkatnya pengangguran disebabkan kebijakan lockdown karena orang-orang tidak keluar rumah untuk melakukan aktifitas produksi dan distribusi. (Partington & Wearden, 2020). Tetapi, yang paling penting ditekankan disini juga mengenai pemerintah Tiongkok yang dianggap sukses dan memiliki kesigapan dalam mengambil tindakan langsung terhadap Covid-19. Dari kesuksesan usaha-usaha mereka dapat dipetik hikmah bahwa sebagai pengambil kebijakan yang berada di garis terdepan tidak boleh terhambat oleh kurangnya dana. Unit perawatan intensif rumah sakit harus diperluas; rumah sakit sementara harus dibangun; respirator, alat pelindung dan masker harus diproduksi secara massal dan tersedia bagi semua yang membutuhkannya. Selain itu, otoritas kesehatan masyarakat harus diberikan sumber daya dan dana yang mereka butuhkan untuk mendisinfeksi pabrik dan ruang publik lainnya. Kebersihan lingkungan juga adalah sangat urgen sekarang ini. Identifikasi setiap kasus dapat menyelamatkan banyak nyawa. Menyerah dan bertawakkal saja tanpa usaha dan ikhtiar terhadap wabah bukanlah suatu pilihan.

#### d. Kebijakan Moneter Kerajaan Arab Saudi

Pada sisi kebijakan moneter dalam upaya mengurangi dampak ekonomi potensial dari wabah virus korona, Otoritas Moneter Arab Saudi melalui Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) meluncurkan paket pembiayaan sebesar SAR 50 miliar untuk mendukung sektor swasta, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Skema baru ini bertujuan untuk memungkinkan sektor swasta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kerajaan Arab Saudi melalui langkah-langkah sebagai berikut:

*Pertama:* Dukungan pembiayaan untuk UKM. Program ini berfokus pada pengurangan dampak negatif tindakan pencegahan yang diadopsi pemerintah dalam memerangi virus corona terhadap UKM terutama volatilitas dalam arus kas. Ini juga bertujuan untuk memberikan modal kerja dimana akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan mempertahankan tingkat lapangan kerja di sektor swasta.

Di bawah skema baru ini, dana sekitar SAR 30 miliar akan digunakan oleh semua bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menunda pembayaran UKM yang menunggak selama enam bulan. UKM juga akan diberikan pinjaman lunak hingga SAR 13,2 miliar dari bank dan lembaga keuangan lainnya agar tetap dapat beroperasi, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat pekerjaan di fasilitas-fasilitas ini. Bank dan lembaga keuangan lainnya akan menggunakan dana sekitar SAR 6 miliar untuk membebaskan UKM dari biaya program jaminan pinjaman. Pendanaan ini bertujuan untuk mengurangi biaya pinjaman bagi penerima manfaat sepanjang tahun 2020.

*Kedua:* Cakupan poin penjualan (POS) dan biaya e-commerce. SAMA akan menanggung biaya pembayaran untuk semua toko dan fasilitas sektor swasta untuk jangka waktu tiga bulan dengan menyediakan dana lebih dari SAR 800 juta. SAMA akan membayar biaya tersebut bagi lembaga penyedia layanan yang terdaftar dalam sistem nasional kerajaan.

*Ketiga:* SAMA akan berkoordinasi dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memfasilitasi pembayaran pinjaman yang dijamin oleh sektor-sektor yang terimbas oleh tindakan pencegahan virus corona yang mana hal ini telah diadopsi di Mekah dan Madinah. Kinerja bank lokal masih dianggap solid dan sektor ini mampu mengatasi tantangan (SAMA, 2020).

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan diantaranya adalah melakukan infak walaupun dalam keadaan sulit sangat penting, seperti halnya yang ditunjukkan oleh sikap kerajaan Arab Saudi dalam kebijakan internasionalnya yaitu memberikan bantuan kepada WHO. Dan dalam kebijakan fiskalnya yang sangat strategis, kerajaan langsung melakukan intervensi yang sigap dan cepat dalam menaikkan anggaran pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak.

Demikian halnya dengan dukungan likuiditas. Ketika dunia sudah dibanjiri dengan likuiditas, tingkat bunga nominal mendekati atau bahkan di bawah nol hampir di mana-mana. Hal ini menyebabkan lebih banyak pemotongan tingkat suku bunga hingga sampai ke zona merah tua yang justru memicu pergerakan keluarnya uang cash dari pasar saham. Dalam situasi sulit ini, yakni pandemic covid-19, pengambil kebijakan ekonomi tidak boleh mengabaikan kebijakan moneter namun tetap diperlukan adalah dukungan dari kebijakan fiskal yang solid.

#### Daftar Pustaka

- Alshebel, Abdullah, Sikki, Kaisar Lahiya, Posumah, Bayu Taufik (2019). "The Impact of Islamic Banking Credits on Saudi Arabia's Economic Growth". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. <https://www.ijcc.net/index.php/ijcc-editions/2019/128-vol-9-iss-6>. Volume 9. Issue 6. Pages 1-24.
- Babbie, Earl (2014). "The Basics of Social Research" (6th ed.). Belmont, California: Wadsworth Cengage. pp. 303–4. ISBN 9781133594147. OCLC 824081715.

- Barro, Robert J. (1987). "Macroeconomics" 2nd edition. MIT Press
- Berg, Bruce Lawrence; Lune, Howard (2012). "Qualitative Research Methods for the Social Sciences" (8th ed.). Boston. p. 3. ISBN 9780205809387. OCLC 732318614.
- Bernanke, Ben (2006). "Monetary Aggregates and Monetary Policy at the Federal Reserve: A Historical Perspective". The Federal Reserve.
- Charlene Gubash and Reuters. "Saudi Arabia to convene virtual G-20 summit on coronavirus ".  
<https://www.nbcnews.com/health/health-news/live-blog/coronavirus-updates-global-cases-approach-200-000-lockdown-becomes-new-n1162561/ncrd1162566#liveBlogHeader>.
- Clarida, Richard; Gali, Jordi; Gertler, Mark (2002). "A simple framework for international monetary policy analysis". *Journal of Monetary Economics*. 49 (5): 879–904. CiteSeerX 10.1.1.591.9773. doi: 10.1016 / S0304-3932 (02) 00128-9.
- Friedman, Milton (1960). "A Program for Monetary Stability". Fordham University Press.
- Goran Petrevski, Borce Trenovski & Biljana Tashevska (2019) The effectiveness of fiscal and monetary policies in a small open economy – the case of Macedonia, *Post-Communist Economies*, 31:6, 805-821, DOI: 10.1080/14631377.2019.1607437
- Hans-Werner Sinn. "How best to fight the economic impact of the coronavirus pandemic".  
<https://www.theguardian.com/business/2020/mar/17/how-best-to-fight-the-economic-impact-of-the-coronavirus-pandemic>.
- Hansen, Bent (2003). "The Economic Theory of Fiscal Policy", Volume 3. Routledge.
- Hommel, Cars H.; Massaro, Domenico; Weber, Matthias (2015). "Monetary Policy Under Behavioral Expectations: Theory and Experiment" (PDF). doi: 10.2139 / ssn.2636234.  
<https://twitter.com/9dmd/status/1241030903662546946>  
<https://twitter.com/saudimomra/status/1240989970929725443>  
<https://www.who.int/csr/don/archive/country/sau/en/>
- Kuttner, K. N. (2002, October). The monetary-fiscal policy mix: Perspectives from the U.S. Prepared for the Conference on The Monetary Policy Mix in the Environment of Structural Changes, National Bank of Poland, Warsaw.
- Mankiw, N. Gregory. (2006). *Macroeconomics* 7th edition. New York.
- Ministry of Municipal and Rural Affairs. "G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Hold Virtual Meeting".
- Ministry of Municipal and Rural Affairs. "Extraordinary G20 Leaders' Summit Chaired by the Custodian of the Two Holy Mosques Issues Statement on Corona Virus (Covid-19)".  
<https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/news/newsDetails/CONT-news-270320201>
- Ministry of Finance. "With More Than SAR 120 bn: Government of Saudi Arabia Implements Urgent Measures to Mitigate the Impact of Coronavirus on Economic Activities and Private Sector".  
[https://www.mof.gov.sa/en/MediaCenter/news/Pages/News\\_20032020.aspx](https://www.mof.gov.sa/en/MediaCenter/news/Pages/News_20032020.aspx)
- Partington, Richard; Wearden, Graeme (9 March 2020). "Global stock markets post the biggest falls since the 2008 financial crisis". *The Guardian*. ISSN 0261-3077. Archived from the original on March 14, 2020. Retrieved March 15, 2020.
- SAMA's Private Sector Financing Support Program. <http://www.sama.gov.sa/en-US/News/Pages/news-514.aspx>.
- "Saudi Arabia takes precautionary fiscal measures to combat coronavirus". *Al Arabiya English* Thursday 19 March 2020. <https://english.alarabiya.net/en/views/business/economy/2020/03/19/Saudi-Arabia-takes-precautionary-fiscal-measures-to-combat-coronavirus>.
- Suranovic, Steve. (2010). "International Trade: Theory and Policy". Saylor Foundation. ISBN 13: 9781936126446
- Samuelson, Robert J. (12 March 2020). "What Crash of 2020 Means". *The Washington Post*. Archived from the original on 11 March 2020. Retrieved 12 March 2020

Williams, Sean (March 10, 2020). "Stock Market Crash 2020: Everything You Need to Know". The Motley Fool. Archived from the original on 12 March 2020. Retrieved 12 March 2020.

"With More Than SAR 120 bn: Government of Saudi Arabia Implements Urgent Measures to Mitigate the Impact of Coronavirus on Economic Activities and Private Sector". <https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654> Friday 1441/7/25 - 2020/03/20/20